

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin , 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta.

Ateng Syafruddin, 1996, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, Tarsito, Bandung.

Aziz Syamsuddin, 2002, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Pengeakan Hukum (Kapita Salekta)*, PT Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jember.

Elwi Danil, 2011, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana. dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo, Jakarta.

Emansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999, jo UU Nomor 20 Tahun 2002 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

IGM Nurdjana, 2003, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utara, Jakarta.

Inu Kencana Syafii & Welasari, 2015, *Ilmu Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia ( Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Huku di Dalam Batas-Batas Toleransi )*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta.

Marwan Effendi, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

O. C Kaligis & Associates, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, O.C Kaligis, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

R, Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta.

SF Marbun dkk, 2002, *hukum administrasi Negara: dimensi-dimensi pemikiran hukum adiminstrasi Negara*, UII PERS, Yogyakarta.

Soejono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soewarno Handayaniingrat, 2002 *Pengantar Studi Adminstrasi dan Management*, Gunung Agung, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Shinta Agustina, dkk, 2015, *Obstruction Of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta.

Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab Akibat dan Prospek pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Yudi Kristina, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif : Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Yogjakarta.

Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Jurnal, Makalah, dan Artikel**

Febri Diansyah, Emerson Yuntho, dan Donal Fariz, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Harpileny Soebiantoro, 2004, *Makalah: Eksistensi Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta.

Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 No. 3 September 2013, Jakarta.

Marwan Mas, *Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Nomor. 1, Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Naskah Akademik dan Rancangan Revisi Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia , Kepolisian Republik Indonesia Tentang *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Indonesia Corruption Watch*, 29 November 2011, Jakarta.

Rasamala Aritonans, *Perjuangan Di Titik Nadir*, 2015, Jurnal Intergrito,  
Volume 48/VII/Nov-Des 2015, Jakarta.

## **Kamus**

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Poewadarmita, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.



#### **Website**

[Http://Kpk.Go.Id/Id/Berita/Berita-Sub/3208-Pemberantasan-Korupsi-Membaik](http://Kpk.Go.Id/Id/Berita/Berita-Sub/3208-Pemberantasan-Korupsi-Membaik),

[Http://M.Gresnews.Com/Berita/Hukum/1939112-Kejati-Sumbar-Lacak-Mantan-Bupati-Solok-Selatan/](http://M.Gresnews.Com/Berita/Hukum/1939112-Kejati-Sumbar-Lacak-Mantan-Bupati-Solok-Selatan/),

<http://www.kpk.go.id/images/Renstra%20KPK%202015-2019.pdf>, RENSTRA KPK tahun 2015-2019.

<http://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan> , Laporan Tahunan KPK Dari

Tahun 2011- 2015.

